LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TANGGAL 03 AGUSTUS 2026
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN 2027

PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2027 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Kerja merupakan upaya untuk mengarahkan tujuan serta sasaran perangkat daerah berkesinambungan dengan kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan dan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 dan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2027. Keberhasilan pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Kami menyadari, tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, pendapat, dan kritik demi penyempurnaan Renja untuk masa yang akan datang. Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renja ini.

Bekasi, 03 Agustus 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi



Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025 ..... **10**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029. 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi 26
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 39
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Berasl Dari Pokok Pikiran DPRD 48
2.6 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI **52**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2027 54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI **57**
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 57
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2027 ..... **79**
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 Yang Didasarkan Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 79
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 Yang Didasarkan Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 80
BAB VI PENUTUP **81**
6.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 81
6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2025-2029.17

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data Desember 2025) 29

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2025.....31

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2025-2029 (Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2025-2029) 31

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 43

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Pokir DPRD) Tahun 2027 Kota Bekasi.....48

Tabel 3. 1 Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.....53

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 54

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 71

Tabel 4 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028.....71

Tabel 5 1 Target dan Capaian Kinerja IKU Badan Kesbangpol Kota Bekasi.79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD 3

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov 4

Gambar 2. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.....29

Gambar 2. 2 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD 42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2025-2029 merujuk pada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Bekasi yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih untuk periode 2025-2029. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2025-2029 sebagai bentuk implementasi arah pembangunan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Renstra perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi untuk tahun anggaran 2027. Dokumen Renja ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam melakukan perencanaan dan keuangan pembangunan. Renja ini berfungsi sebagai panduan (*Guidance*) tahunan di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat urusan (langsung) pada Badan Kesbangpol.

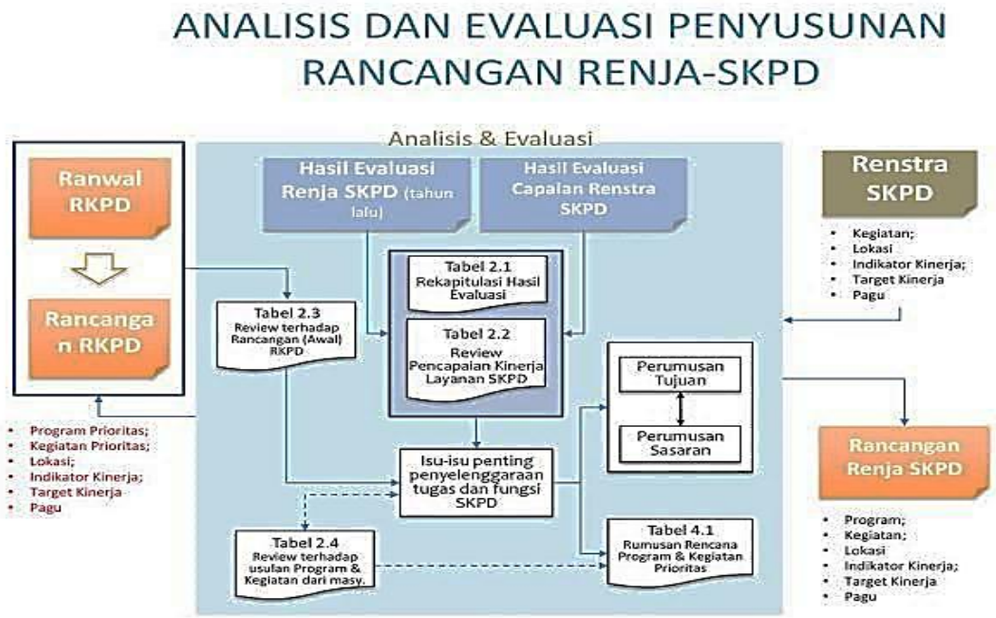
Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun ketiga periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kinerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2027. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2027, Renja Ditjen Polpum dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sangat memperhatikan program prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Bekasi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol sangat terkait erat dengan Misi ke-2 (kedua), yaitu "***Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan"***. Peran Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam mendukung misi ini adalah sebagai pendukung bagi **"*Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat*"**, yang merupakan sasaran ke 2 dari Tujuan ke 4 RPJMD Kota Bekasi.

Oleh karena itu, sasaran ke 2 dari misi ke 4 RPJMD Kota Bekasi secara linear akan dijadikan sebagai tujuan dari Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi, yaitu **"*Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat*".** Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan salah satu alat di dalam menjalankan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Kesbangpol. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam

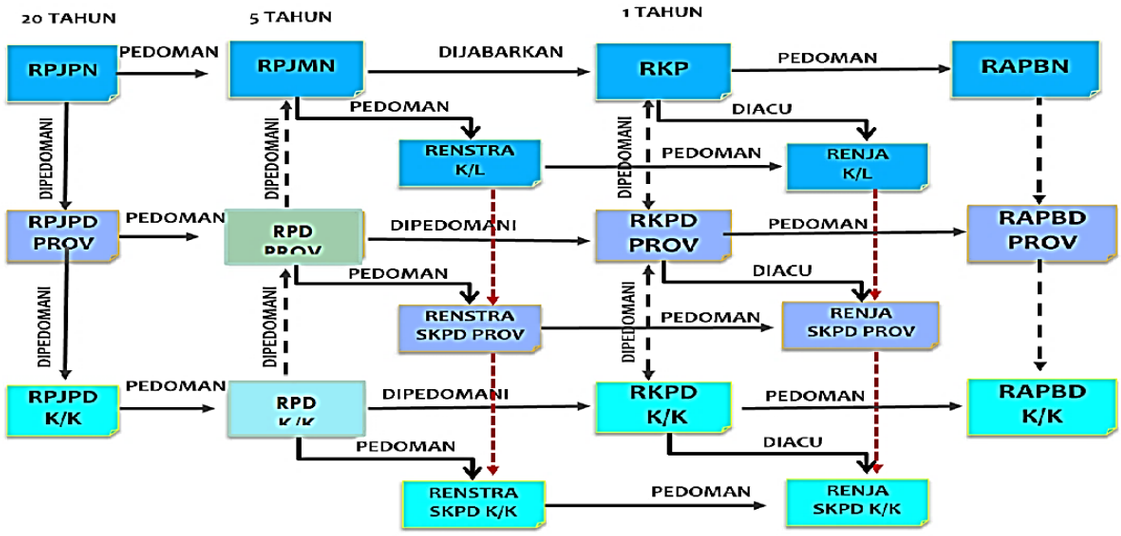
penyusunan Renja Badan Kesbangpol adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kesbangpol sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi juga mengacu kepada perundang-undangan tersebut.

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renja PD dengan RKPD



Pada Renja ini juga akan dijelaskan terkait prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik. Salah satu prioritas pembangunan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Jawa Barat adalah pengutan fungsi deteksi dini di wilayah Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat melalui sinkronisasi Sistem Informasi Situasi dan Kondisi Daerah (SIKONDA). Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat melakukan peningkatan kapasitas fungsi deteksi dini di Kota Bekasi melalui kerjasama deteksi dini dengan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renja PD dengan Renja PD Prov



Langkah yang dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi terkait peningkatan kapasitas deteksi dini di wilayah Kota Bekasi adalah dengan melakukan kolaborasi kinerja fisik dengan Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi kegiatan dapat dilakukan dengan pembagian data pemantauan situasi kondisi daerah (SIKONDA) dan pemetaan wilayah rawan konflik.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunannya, Renja Badan Kesbangpol Tahun 2027 didasarkan kepada :

- Landasan Ideologi Pancasila;
- Landasan Konstituisonal Undang-Undang Dasar 1945;

Landasan operasional, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) yang Telah Dirubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2045 (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 129 Seri D);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penyusunan Renja adalah untuk memberikan panduan dan arah bagi aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Badan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Renja Badan Kesbangpol ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan

oleh aparatur Badan Kesbangpol. Renja ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan yang dijalankan Badan Kesbangpol sejalan dan searah dengan Rencana Pembangunan Daerah atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bekasi.

b. Tujuan penyusunan Renja Tahun 2027:

Adapun tujuan dari Renja Badan Kesbangpol, adalah:

1. Merumuskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol dalam jangka tahun 2027 agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif;
2. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pelaksanaan kegiatan yang hendak dicapai dalam tahun 2027;
3. Menetapkan pedoman (input, output dan outcome) dalam melaksanakan kegiatan tahunan Badan Kesbangpol;
4. Memudahkan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir dari organisasi;
5. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bakesbangpol Kota Bekasi Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN.

   Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESBANGPOL TAHUN 2025.

   Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program serta kegiatan masyarakat;

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
   Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional terkait bidang kerja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
   Bab ini menguraikan Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
5. BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
   Bab ini Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. BAB VI PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tahun 2025-2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Badan Kesbangpol untuk melaksanakan pembangunan di Kota Bekasi.

Rencana Strategis menjadi landasan konsepsional di dalam melakukan perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran. Indikator tersebut antara lain:

1. Inklusi Sosial;
2. Persentase Konflik Sosial Daerah yang Diselesaikan;

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan dalam proses perumusan Renja Badan Kesbangpol adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara menyeluruh yang dikaitkan dengan empat komponen indikator sasaran tersebut. Kondisi daerah Kota Bekasi terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari indikator sasaran sebagai berikut:

1. Inklusi Sosial

Indikator ini dipilih untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkup peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Indikator ini diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu, dimensi akses dan kesetaraan layanan publik, dimensi partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan kehidupan berorganisasi, serta dimensi toleransi dan kehidupan harmonis antar warga di Kota Bekasi. Dimensi diukur melalui

kombinasi data kuantitatif (Partisipasi Akses) dan Data Kualitatif (Hasil Survei Presepsi). Setiap dimimensi dinormalisasi dalam Skala 1 – 10, lalu dirata – ratakan untuk mendapatkan Nilai Indeks Inklusi Sosial Tahunan dengan rumus:

$$= \frac{Skor\ Akses + Skor\ Partisipasi + Skor\ \ Toleransi}{3}$$

Skor akses diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang tersedia pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi melalui aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi. Dari aplikasi tersebut diperoleh data dimensi skor akses Badan Kesbangpol Kota Bekasi dengan nilai 8,6. **Skor partisipatif** diperoleh dari jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, Ormas, politik dan Pemilu yang tercatat di Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Untuk Tahun 2025, tercatat partipasi masyarakat Kota Bekasi pada:

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 137 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 137 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar 40 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 40 Orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 200 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 200 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%;
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 1.440 orang. Target program ini untuk Tahun 2025 sebesar 1.500 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 96,00%. Program ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya efesiensi dan refocusing program;
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar 50 orang. Maka, persentase capaian partisipatif pada program ini sebesar 100%.

Berdasarkan data di atas, maka nilai skor partisipasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 9,9.

Skor Toleransi diperoleh dari hasil penilaian Setara Institut terkait situasi toleransi di Kota Bekasi. Untuk Tahun 2025, skor indeks toleran Kota Bekasi masih menggunakan data Tahun 2024. Skor Indeks Toleran Kota Bekasi pada Tahun 2024 adalah 5,9. Dengan menggunakan rumus di atas, nilai Inklusi Sosial di Kota Bekasi pada Tahun 2025 mencapai 8,13. Nilai ini melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 7,63 dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,55%.

2. Persentase Konflik Sosial Daerah Yang Diselesaikan

Indikator ini fokus terhadap bagaimana peranan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam memfasilitasi penanganan terhadap konflik yang diterima atau yang terlaporkan, sehingga dalam formulasi rumusan pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ Daerah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ Daerah\ yang\ dilaporkan}\ x\ 100\ \%$$

Pada tahun 2025, indikator kinerja ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang Tahun 2025 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kejadian potensi konflik/konflik sosial yang terjadi di Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

1) Konflik/ Potensi Konflik SARA sebanyak 1 kejadian;
2) Konflik/ Potensi Konflik Sosial Budaya sebanyak 38 kejadian.

Badan Kesbangpol Kota Bekasi melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik telah memfasilitasi penyelesaian 39 kejadian potensi konflik/ konflik sosial daerah yang terjadi di Kota Bekasi. Dengan menggunakan rumus di atas, persentase konflik sosial yang diselesaikan pada Tahun 2025 mencapai 100%. Hasil ini menyamai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 100%. Pembahasan lebih rinci terkait 2 (dua) sasaran kinerja Badan Kesbangpol akan dibahas pada bagian Analisi Capaian Kinerja pada sub bab selanjutnya.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA. 2025 ditunjang oleh pemberian anggaran sebesar **Rp.38.550.364.050,-** yang terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp.38.550.364.050,-** dan belanja modal sebesar **Rp.0.-** Realisasi Belanja Operasi pada TA.2025 sebesar **Rp. 33.393.054.273** atau 86,62% dari total anggaran.

Ditinjau dari kinerja program/ kegiatan pada belanja rutin badan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mencapai kinerja sebesar 87,51 persen. Artinya program ini melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.171.327.426 dari total pagu yang disediakan sebesar Rp. 12.765.800.250. Faktor yang mendukung pencapaian program/kegiatan dari belanja rutin ini adalah:

a. Adanya komitmen kinerja dari aparatur Badan Kesbangpol;
b. Tersedia pagu anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah ditargetkan;
c. Adanya efesiensi anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol tanpa mengurangi capaian realisasi kinerja.

Adapun perincian Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Dari sisi belanja operasional badan yang mendukung urusan Badan, terdapat 5 (lima) program yang mendukung pencapaian kinerja badan, antara lain:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini pada TA. 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.957.582.000 dengan penyerapan sebesar Rp. 9.618.672.000 atau 96,59 persen. Pada tahun 2025 ini jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan dan pendidikan politik daerah dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi sebanyak 1200 Orang. Pembinaan Politik dilakukan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan berlandaskan tupoksi, antara lain:
   a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada kader Partai Politik dan aparatur KPU terkait bantuan Parpol TA. 2025 dan Hibah KPU Tahun 2025;
   b. Menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang diadakan oleh institusi mitra;
   c. Memberikan fasilitasi bantuan keuangan bagi parpol di Kota Bekasi yang mendapat hak dan kedudukannya di parlemen. Pada Tahun

2025, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 200.1.5.3/Kep.199-Kesbangpol/IV/2025 tanggal 10 April 2025 terdapat 9 (Sembilan) Parta Politik yang mendapatkan bantuan keuangan;

d. Fasilitasi bantuan dana hibah bagi lembaga pemerintah di Kota Bekasi (KPU dan BAWASLU) berdasarkan SK Wali Kota Bekasi nomor 200.1.5.2/Kep.200-Kesbangpol/IV/2025 (KPU) dan SK Wali Kota Bekasi nomor 000.7.7.1/Kep. 696-Kesbangpol/XI/2025 (Bawaslu).

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Program ini pada TA. 2025 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.653.737.300 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.371.461.000 atau 82,93 persen. Program ini memiliki target 100% dengan realisasi yang dicapai sebesar100%. Pada tahun 2025 ini jumlah masyarakat yang terlibat dalam program ini sebanyak 137 orang. Program ini mencakup:
   a. Pelaksanaan Bela Negara di Kota Bekasi; dan
   b. Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bekasi

   Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini pada TA 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.779.956.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.565.000.000 atau 86 persen. Program ini memiliki target pembinaan dan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan memiliki target sebesar 200 Orang, dengan realisasi capaian pembinaan sebesar 200 orang. Untuk persentase Ormas yang aktif sebesar 75%. Hasil ini melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 71%. Maka, persentase capaian program ini di Tahun 2025 sebesar 105,63%. Adapun pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi meliputi:
   a) Fasilitasi bantuan dana hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi. Pada Tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 000.7.7.1/Kep.306-TU/VI/2024 Tentang Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran 2025 tanggal 10 Juni 2024, Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengelola dana hibah dan bantuan sosial untuk 24 Ormas dan Institusi Pemerintah;

b) Fasilitasi legalitas Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi. Pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 44 Ormas mendapat Surat Tanda Lapor dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Total Ormas yang telah mendapatkan STL per desember 2025 adalah 336 Ormas;
c) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan yang berlaku terkait Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Program ini pada TA. 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.066.848.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 631.650.000 atau 59,21 persen. Rendahnya penyerapan anggaran pada program ini disebabkan karena adanya efesiensi dan refocusing pada beberapa kode rekening sub kegiatan. Dari sisi kinerja fisik, target yang ditetapkan untuk program ini sebesar 100% dengan tingkat realisasi 100%. Program ini melakukan berbagai kegiatan, antara lain:
   a. Fasilitasi Sinergitas tokoh masyarakat Kota Bekasi dengan pemerintah daerah. Pada Tahun 2025 ini Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan 20 kegiatan ekspose Ormas dan 44 kegiatan pelayanan pendaftaran Ormas. Adapun jumlah orang yang terfasilitasi dalam program ini sebesar 320 orang;
   b. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi dalam bentuk pemberian bantuan hibah dan koordinasi kegiatan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Kerjasama yang baik ini menghasilkan penghargaan Harmony Award Tahun 2025;
   c. Fasilitasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dengan memberikan bantuan hibah kepada MUI;
   d. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Bekasi. Pada Tahun 2025 Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melaksanakan fasilitasi P4GN di Kota Bekasi sebanyak 7 kegiatan yang dihadiri 700 orang peserta dari siswa SMA sederajat;
   e. Fasilitasi Legalitas Penerbitan Pertimbangan Rumah Ibadah di Kota Bekasi;
   f. Mengadakan Road Show tentang pencegahan toleransi dan anti radikalisme dengan peserta sebanyak 800 orang.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Program ini pada TA. 2025

dianggarkan sebesar Rp. 3.326.440.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.088.391.803 atau 63 persen. Beberapa kode rekening pada program ini tidak dapat dilakukan penyerapan karena adanya efesiensi dan refocusing. Terkait kinerja fisik program, pada tahun 2025 ini jumlah penanganan potensi konflik yang telah diterima oleh Badan Kesbangpol sebanyak 39 Kasus, dan dari keseluruhan kasus tersebut dapat tertangani dengan baik oleh Badan Kesbangpol berserta jajaran unsur terkait dalam melakukan penanganan potensi konflik di Kota Bekasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan program ini, diantaranya:

a. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi (FKDM, TNI, POLRI, BINDA, KEJAKSAAN, IMIGRASI. dll);
b. Fasilitasi Forkopimda Kota Bekasi, forum ini diketuai Wali Kota Bekasi dan beranggotakan: Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi.
c. Fasilitasi legalitas Surat Keterangan Lapor Orang Asing di Kota Bekasi;
d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang undangan terkait Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi;

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2025-2029

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
8	**Urusan Pemerintahan Umum**										
8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**										
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Pengkuran target pada program ini tidak bersifat kumulatif. Target dicapai per tahun anggaran
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK	12 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	33,33%	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	22,22%	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	22,22%	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai NSPK	12 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	33,33%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
8.01.01.2.02.1	Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7.722 Orang/ Bulan	-	1.020 Orang/ Bulan	1.020 Orang/ Bulan	100%	1.020 Orang/Bulan	2.040 Orang/ Bulan	26,41%	
8.01.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	96 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100%	16 Laporan	32 Laporan	33,33%	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian daerah yang disusun sesuai NSPK	15 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	20%	
8.01.01.2.05.2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	250 Paket	-	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	100 Paket	40%	
8.01.01.2.05.9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	36 Orang	-	6 Orang	2 Orang	33,33%	10 Orang	12 Orang	33,33%	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	-	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	0%	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai NSPK	36 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	12 Laporan	33,33%	
8.01.01.2.06.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	22 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	6 Paket	27,27%	
8.01.01.2.06.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	66 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100%	12 Paket	18 Paket	27,27%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		penggandaan yang disediakan									
8.01.01.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	62 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	12 Dokumen	14 Dokumen	22,58%	
8.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 Dokumen	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	33,33%	
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	72 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	33,33%	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan	5 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	20%	
8.01.01.2.07.6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	-	-	-	-	7 Unit	7 Unit	20%	
8.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1 Laporan	100%	
8.01.01.2.08.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	-	6 Laporan	100%	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	18 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	33,33%	
8.01.01.2.09.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	104 Unit	-	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	44 Unit	42,30%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
	kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	dipeliharan dan dibayarkan pajaknya									
8.01.01.2.09.6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit	-	25 Unit	15 Unit	60%	25 Unit	40 Unit	26,66%	
8.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	20%	
8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Pengkuran target pada program ini tidak bersifat kumulatif. Target dicapai per tahun anggaran
8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	22 Sub Kegiatan	-	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	4 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	27,27%	
8.01.02.2.01.3	Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.395 Orang	-	85 Orang	85 Orang	100%	200 Orang	285 Orang	20,43%	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	610 Orang	-	-	-	-	90 Orang	90 Orang	14,75%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
	Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	6 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	344 Orang	-	52 Orang	52 Orang	100%	52 Orang	52 Orang	15,11%	
8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase pendidikan politik pada kader Partai Politik**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Pengkuran target pada program ini tidak bersifat kumulatif. Target dicapai per tahun anggaran
8.01.03.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	12 Sub Kegiatan	-	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	33,33%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
8.01.03.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	66 Dokumen	-	11 Dokumen	10 Dokumen	90,90%	11 Dokumen	21 Dokumen	31,81%%	
8.01.03.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	4.040 Orang	-	40 Orang	40 Orang	100%	1.500 Orang	1.540 Orang	38,11%	
8.01.04	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**75%**	**-**	**70%**	**75%**	**100%**	**71%**	**75%**	**100%**	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	12 Sub Kegiatan	-	2 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	50%	2 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	25%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		Organisasi Kemasyarakatan									
8.01.04.2.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	78 Dokumen	-	24 Dokumen	20 Dokumen	83,33%	5 Dokumen	25 Dokumen	32,05%	
8.01.04.2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800 Orang	-	200 Orang	120 Orang	60%	100 Orang	220 Orang	27,50%	
8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Pengkuran target pada program ini tidak bersifat kumulatif. Target dicapai per tahun anggaran
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan	6 Sub Kegiatan	-	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	100%	1 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	33,33%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
		pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
8.01.05.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.500 Orang	-	1.500 Orang	1.440 Orang	96%	400 Orang	1.840 Orang	52,57%	
8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**100%**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	Pengkuran target pada program ini tidak bersifat kumulatif. Target dicapai per tahun anggaran
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	18 Sub Kegiatan	-	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	100%	3 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	33,33%	
8.01.06.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	1.830 Orang	-	50 Orang	-	0%	70 Orang	70 Orang	3,82%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2025			Target Program dan Kegiatan (n-1) 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)= (5+7+9)	(11)= (10/4)	(12)
	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
8.01.06.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah	72 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	33,33%	
8.01.06.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	72 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	24 Dokumen	33,33%	

(*Sumber : LKIP Badan Kesbangpol 2025 dan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2029*)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi

Keberhasilan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui sinergi perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat nasional dengan perencanaan yang berada di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah melakukan penyesuaian pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Seluruh dasar hukum pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bekasi mengacu/mengadopsi dasar hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Saat ini, produk layanan yang diberikan Badan Kesbangpol Kota Bekasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Lapor Keberadaan kepada Oganisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang berdomisili di Kota Bekasi. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan produk hukum Badan Kesbangpol Kota Bekasi yang merupakan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. Penerbitan SKT ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
2) Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah kepada Panitia Pendirian Rumah Ibadah. Surat pertimbangan ini merupakan produk hukum yang didasari oleh Peraturan Bersaman Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian RUmah Ibadat. Penerbitan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
3) Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang Asing. Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Orang asing ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4) Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini berada di bawah tanggung jawab Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
5) Fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama melalui kegiatan roadshow, seminar, sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), pelayanan tersebut

menjadi tanggung jawab Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

6) Pembinaan Pendidikan Politik untuk masyarakat pemula dan partai politik. Kegiatan ini merupakan tupoksi pada Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Bidang Politik Dalam Negeri;
7) Pembinaan bela negara, Penguatan ideologi pancasila melalui tema kebangsaan, Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat pemula, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik dan anggota Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa;
8) Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Badan Kesbangpol memfasilitasi kegiatan tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengbar Bendera Pusaka. Kegitan ini merupakan sebagai sarana untuk mencetak calon-calon pemimpin berkarakter Pancasila yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara yang tinggi.
9) Fasilitasi bantuan hibah kepada Forum/Organisasi bentukan pemerintah dan Orkemas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kemasyarakatan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
10) Fasilitasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Bidang Fasilitiasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik;
11) Fasilitasi Hibah kepada Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang, Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

12) Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Forkopimda Tim Sekretariat Forkopimda memberikan dukungan teknis administrasi dan teknis operasional, Badan Kesbangpol telah menyediakan anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Forkopimda di Kota Bekasi;
13) Fasilitasi tim kewaspadaan deteksi dini daerah yang bertujuan untuk memantau perkembangan kantrantibmas dan kerawanan sosial-politik di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

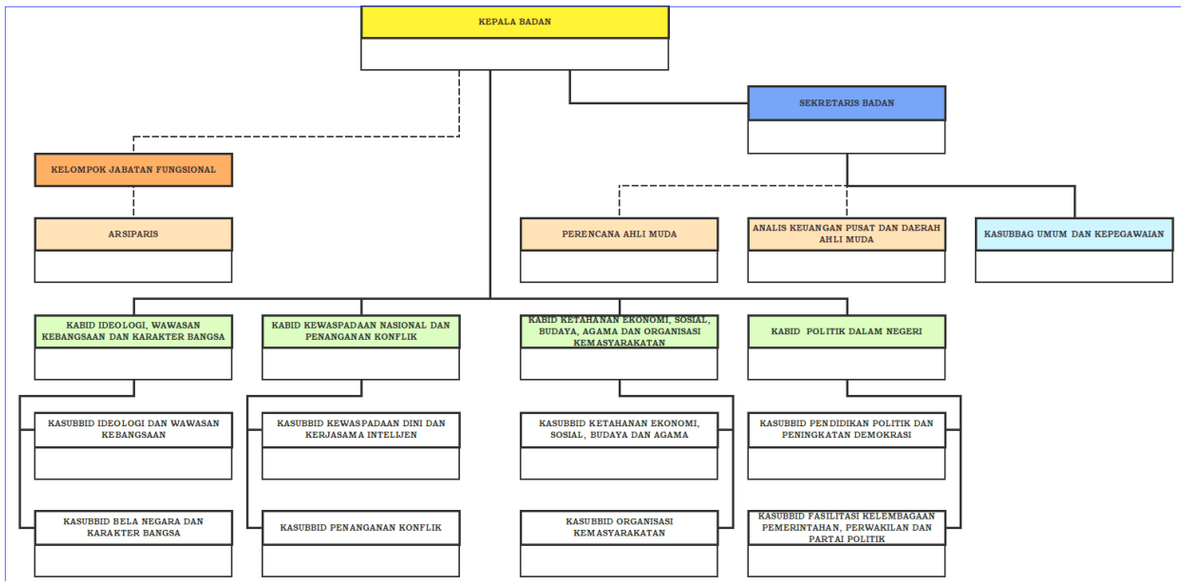
Selain itu, pelayanan Badan Kesbangpol kepada masyarakat juga dilakukan ke dalam bentuk pelaksanaan belanja urusan. Belanja urusan ini berupa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2025 belanja urusan Badan Kesbangpol sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Badan dalam melaksanakan kegiatan urusan antara lain:

1) Masih adanya *misedlink* capaian yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap capaian yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kuantitas maupun kualitas, dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol;

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dijelaskan bahwa struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Badan, yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat Administrator, 9 (sembilan) pejabat pengawas dan kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2. 1 Struktur Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)



Sumber daya Badan Kesbangpol Kota Bekasi terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Aset. SDM merupakan faktor sentral dan strategis dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, SDM merupakan penggerak utama dari organisasi tersebut. Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2024, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 48 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut Esselonoring (Data Desember 2025)

No	Kategori Klasifikasi		JUMLAH	
			Volume	Satuan
1	**STATUS KEPEGAWAIAN**		**47**	**Orang**
	a	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	37	Orang
	b	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	10	Orang
2	**STATUS ESELONERING / JABATAN**		**47**	**Orang**
	a	Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama)	1	Orang
	b	Eselon III (Jabatan Administrator)	5	Orang
	c	Eselon IV (Jabatan Pengawas)	9	Orang
	d	Jabatan Fungsional Teknis	3	Orang
	e	Jabatan Fungsional Umum	29	Orang
3	**JENIS KELAMIN**		**47**	**Orang**
	a	LAKI- LAKI	28	Orang

No	Kategori Klasifikasi		JUMLAH	
			Volume	Satuan
	b	PEREMPUAN	19	Orang
4	**KUALIFIKASI PENDIDIKAN**		**47**	**Orang**
	a	Doktor (S3)	1	Orang
	b	Magister (S2)	13	Orang
	c	Sarjana (S1)	24	Orang
	d	Diploma (D3)	2	Orang
	e	SLTA / SMA	7	Orang
5	**KUALIFIKASI KELOMPOK USIA**		**47**	**Orang**
	a	20 - 29 Tahun	0	Orang
	b	30 - 44 Tahun	14	Orang
	c	45 - 64 Tahun	33	Orang

Sumber : *Data nominatif pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi per Desember tahun 2025*

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2025

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Inklusi Sosial $= \frac{Skor\ Akses + Skor\ Partisipasi + Skor\ Toleransi}{3}$	-	-	7,63	7,65	7,67	8,13	-	-	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2025-2029
2	Persentase Konflik Sosial Daerah yang diselesaikan $\frac{Jml.konflik\ SARA\ yang\ diselesaikan\ (n)}{Jml.konflik\ SARA\ yang\ dilaporkan\ (n)} x100$	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	

(*Sumber : Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2025-2029 dan IKU Bakesbangpol*)

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja SKPD Pada Tahun 2025-2029 (Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2025-2029)

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Inklusi Sosial Rumus: $= \frac{Skor\ Akses + Skor\ Partisipasi + Skor\ Toleransi}{3}$	-	-	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73	8,13	-	-	-	-	
2	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan Rumus: $\frac{Jml.konflik\ SARA\ yang\ diselesaikan\ (n)}{Jml.konflik\ SARA\ yang\ dilaporkan\ (n)} x100$	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	

(*Sumber : Rencana Strategis Teknokratis Bakesbangpol Tahun 2025-2029 dan IKU Bakesbangpol*)

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Sebagai kawasan perkotaan dengan dinamika sosial, ekonomi dan politik yang tinggi, permasalahan kota metropolitan berlaku di Kota Bekasi. Permasalahan itu meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa dan negara diwaktu-waktu mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mampu mewujudkan sistem dan budaya politik yang demokratis baik nasional maupun di daerah. Terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, tantangan ini juga menjadi dasar dan kerangka penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depannya yakni penguatan persatuan dan kesatuan serta pembangunan sistem politik demokrasi. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1) Belum optimalnya pendayagunaan SDM aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan database Partai Politik, Ormas/LSM, OKP;
3) Masih diperlukan peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka penciptaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
4) Terbatasnya dukungan anggaran operasional Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam menyelengarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1) Letak geografis Kota Bekasi yang menjadi jalur utama lalu lintas dan mobilitas manusia antara kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta dan daerah lainnya telah menjadikan Kota Bekasi sebagai daearah transit dan tujuan utama berbagai aksi kejahatan transnasional dalam bentuk seperti penyelundupan narkotika, human trafficking, pencurian dan aksi terorisme;
2) Potensi konflik sosial yang masih tinggi antar Ormas/LSM dan OKP dalam memperebutkan lahan/daerah yang diakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran;

3) Kesenjangan sosial antara pendatang yang makmur dan pandai (*welleducated*) dengan penduduk pribumi yang masih berpendidikan dan berpenghasilan rendah;
4) Tingkat urbanisasi yang tinggi ke wilayah Kota Bekasi dari berbagai daerah dapat menimbulkan kelangkaan lapangan pekerjaan sehingga rentan terjadinya konflik sosial.

Peluang dalam menyelengarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan basis teknologi informatika;
2) Memperluas jejaring informasi pencegahan dini dengan melibatkan peranserta seluruh elemen masyarakat dalam forum-forum kemasyarakatan yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dibentuk mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga sampai ke pranata lembaga pemerintahan yang paling dekat dapat dijangkau oleh masyarakat Kota Bekasi;
3) Menguatkan peran kelembagaan sosial kemasyarakatan melalui program pengembangan kerjasama Pemerintah Daerah dengan unsur masyarakat yang diwakili misalnya oleh Ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
4) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, misalnya pihak Sekolah SMA/SMK sederajat dan Universitas, dalam melakukan upaya pengembangan program dan pemahaman pentingnya fungsi dan tugas bidang kesatuan bangsa yang diemban oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Dengan demikian, rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang telah diurai dimuka maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Program dan kegiatan pendukung pelayanan administrasi perkantoran hendaknya ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena beberapa item kegiatan dan penganggaran merupakan dukungan secara langsung pada program dan kegiatan teknis.
2) Penentuan sub kegiatan pada kegiatan teknis harus memperhatikan sebaran sasaran baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

3) Memungkinkan adanya sub kegiatan baru dalam mengoptimalkan ketercapainya tujuan dan sasaran OPD untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kota Bekasi disandingkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Bakesbangpol merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) Tahun 2027 yang disusun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

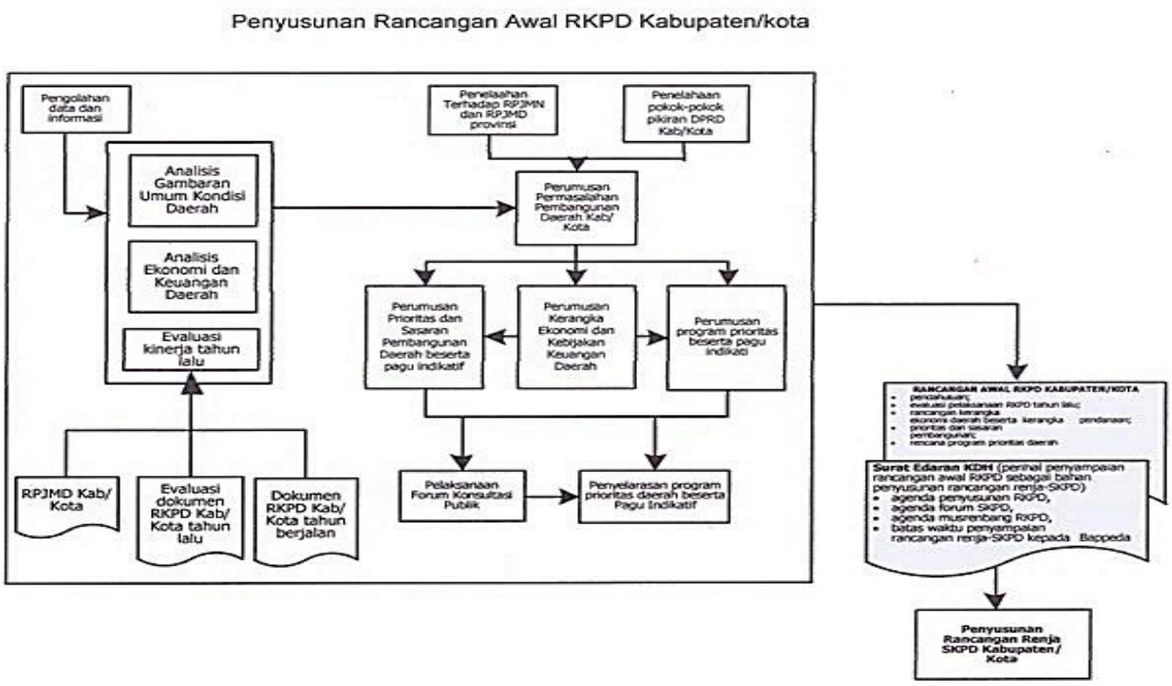
Disamping itu, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kesbangpol Tahun 2027 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Program dan kegiatan Tahun 2027 yang telah diusulkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2027 yang merupakan penyelarasan program secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Bakesbangpol) oleh

karena itu perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen (Renja-Bakesbangpol) yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan.

Secara keseluruhan, Review terhadap rancangan awal RKPD hasil telaahan terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2. 2 Alur Rancangan Awal RKPD dan Renja PD



Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**13.478.018.880**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**12.392.385.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK**	**2 Dokumen**	**76.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai NSPK**	**2 Dokumen**	**76.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	51.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	51.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK**	**2 Laporan**	**11.498.118.880**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK**	**2 Laporan**	**10.312.485.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.316 Orang/bulan	11.483.118.880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.316 Orang/bulan	10.297.485.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK**	**6 Laporan**	**220.400.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK**	**1 Laporan**	**20.400.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SKPD	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	50 Paket	100.000.0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SKPD	-	-	-	Efesiensi
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.400.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK**	**6 Laporan**	**892.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK**	**6 Laporan**	**892.500.000**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	357.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	357.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	76.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	76.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	51.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	51.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	51.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah laporan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**1 Laporan**	**102.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang disediakan**	**1 Laporan**	**202.000.000**	**Bertambah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	102.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	202.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara**	**3 Laporan**	**688.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara**	**3 Laporan**	**888.500.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	357.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	357.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	76.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	76.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	255.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	455.000.000	
II	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**100 %**	**1.983.168.164**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**100 %**	**1.285.938.892**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**4 Sub Kegiatan**	**1.983.168.164**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**3 Sub Kegiatan**	**1.285.938.892**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	230 Orang	52.590.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350 Orang	21.538.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	525.900.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	50.900.000	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	191.177.272	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	-	-	
	Pembentukan Paskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paskibraka	60 Orang	1.213.500.892	Pembentukan Paskibraka	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paskibraka	52 Orang	1.213.500.892	
III	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**100%**	**10.820.792.184**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**100%**	**9.916.098.400**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika		**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,**	**2 Sub Kegiatan**	**10.820.792.184**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika**		**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika**	**2 Sub Kegiatan**	**9.916.098.400**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		**Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			**Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**		**Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	10.452.662.184	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	9.687.880.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500 Orang	368.130.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1250 Orang	228.218.400	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**	**72 %**	**6.153.030.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**	**72 %**	**2.883.283.058**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**2 Sub Kegiatan**	**6.153.030.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**2 Sub Kegiatan**	**2.883.283.058**	
	Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	5 Dokumen	6.047.850.000	Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	5 Dokumen	2.778.103.058	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	105.180.000	Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 Orang	105.180.000	
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi**	**100 %**	**397.392.023**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan**	**100 %**	**610.689.503**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan					**narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1 Sub Kegiatan**	**397.392.923**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**1 Sub Kegiatan**	**610.689.503**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	397.392.923	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2800 Orang	610.689.503	
VI	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**100 %**	**2.773.806.960**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**100 %**	**2.119.217.400**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**3 Sub Kegiatan**	**2.773.806.960**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**3 Sub Kegiatan**	**2.119.217.400**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	350.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	114.737.400	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	564.480.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	564.480.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.859.326.960	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.440.000.000	
				Total	**35.606.208.211**				**Total**	**29.207.612.253**	

(*Sumber : Rencana Strategis Bakesbangpol Tahun 2025-2029*)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Berasal Dari Pokok Pikiran DPRD dan *Stakeholder*

Dalam melakukan perumusan rencana program/kegiatan, Badan Kesbangpol selalu melibatkan *stakeholder* di dalam merumuskan perencanaan. Dari *stakeholder* tersebut akan terkumpul masukan dan aspirasi terkait perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menjaring aspirasi tersebut, Badan Kesbangpol memulai dari tahapan Musrenbang tingkat Kecamatan, kemudian melalui Forum SKPD, dan diakhiri dalam Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi.

Dari forum-forum penjaringan aspirasi/masukan tersebut, terdapat usulan dari masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan SKPD. Usulan tersebut adalah :

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Pokir DPRD) Tahun 2027 Kota Bekasi

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kota Bekasi	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9.916.098.400	Bantuan Keuangan ke Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029; Bantuan keuangan antar lembaga pemerintah
2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
	Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun	2.778.103.058	Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan (MUI, FKUB, FPK, FKDM dan Organisasi Lainnya)
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Persentase konflik sosial yang diselesaikan		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	564.480.000	Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.440.000.000	Sub kegiatan ini dianggarkan untuk memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bekasi
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kota Bekasi	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Bekasi	Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	610.689.503	Sub Kegiatan ini terdapat usulan (pokir) anggota DPRD

(*Sumber : Usulan Pemangku Kepentingan dan Dokumen Rencana Strategis bakesbangpol Tahun 2025-2029*)

Selain itu, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan koordinasi dengan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat terkait penguatan Renja Badan. Berdasarkan hasil pembahasan Desk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Antara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi tentang Perencanaan Pembangunan Tahun 2027, dijelaskan bahwa:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Kode Sub Kegiatan 8.01.03.2.01.003 belum termasuk di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat meminta agara Sub Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada TA. 2027. Terkait hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menunggu penyesuaian RPJMD Kota Bekasi di bawah koordinasi Bapperida Kota Bekasi;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Kode Sub Kegiatan 8.01.06.2.01.0004 belum termasuk di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat meminta agara Sub Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada TA. 2027. Terkait hal tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menunggu penyesuaian RPJMD Kota Bekasi di bawah koordinasi Bapperida Kota Bekasi.

2.6 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan inovasi pelayanan terkait pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Inovasi pelayanan yang dimaksud, meliputi:

1) Layanan Surat Keterangan Izin Penenelitian, PKL dan Magang menggunakan media elektronik dan sosial media, seperti gform, qrcode, Instagram, serta Surat keterangan penelitian dan sertifikat PKL/Magang berbasis elektronik;
2) Layanan Surat Tanda Lapor Organisasi Kemasyarakatan yang menggunakan media elektronik dan sosial media, seperti gform, qrcode.

Output dari layanan ini adalah Surat Tanda Lapor Organisasi Kemasyarakatan berbasis elektronik.

Inovasi tersebut di atas merupakan salah satu upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah pertama dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJMN Ke-1 tahun 2025-2029 adalah RPJMN ketiga Tahun 2025-2045, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045, yaitu: *"Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian".* Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".* Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi yang diemban dikenal sebagai Delapan Asta Cita, yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk melaksanakan 8 (delapan) misi pemerintah pusat di atas, urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik difokuskan kepada memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pada Tahun Anggaran 2027, kebijakan nasional difokuskan kepada Ketahanan pangan, energi, dan air; Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas ekonomi; Inklusivitas dan pemerataan pembangunan; Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan pertahanan semesta. Mengacu kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyelarasan kebijakan pembangunan di Kota Bekasi yang dikaitkan dengan unsur bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Kota Bekasi Tahun 2027 Yang Beririsan Dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

<table>
<tr><th colspan="2">Tema Pembangunan Tahun 2027</th></tr>
<tr><th>Nasional</th><th>Kota Bekasi</th></tr>
<tr><td>Penegakan hukum: Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN)</td><td rowspan="4">Peningkatan kemudahan investasi.

Penjelasan:
Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki sasaran RPJMD “meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat” demi mendukung terwujudnya tujuan peningkatan kemudahan investasi. Sasaran RPJMD ini juga memiliki keterkaitan dengan tema pembangunan nasional (Inklusivitas pembangunan dan pertahanan semesta).</td></tr>
<tr><td>Pertahanan Keamanan: stabilitas sosial-politik daerah sebagai syarat pelaksanaan program di lapangan</td></tr>
<tr><td>Tata Kelola: netralitas ASN dan tata kelola politik yang bersih</td></tr>
<tr><td>Inti: klaster PKPN menyasar target pertumbuhan 7,3–7,5% di 2027, tapi pertumbuhan itu butuh iklim investasi yang stabil — dan stabilitas sosial-politik itulah yang dijaga Kesbangpol lewat deteksi dini konflik dan penguatan kohesi sosial.</td></tr>
</table>

Sumber: RPJMN 2025-2029, RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2025-2029

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2027

Berdasarkan penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan 2025-2029, maka Tujuan dan sasaran Badan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Tujuan:				
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat		Indeks Harmoni	6,49
Sasaran:				
1		Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi	Inklusi Sosial	7,67
2		Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan harmoni di daerah	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan	100%

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, **Tujuan** Rencana Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi periode tahun 2025 – 2029 adalah *"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat"* yang selaras dengan Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang dengan indikator *"Indeks Harmoni"*. Penggunaan kinerja Indeks Harmoni ini mengacu terhadap Surat Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor:

400.4.7/e-170/Polpum tanggal 25 Februari 2025 tentang Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Tahun 2025, yang dalam pengukurannya diukur dari 4 (empat) dimensi, yaitu : Dimensi Ekonomi (Skor 30%), Dimensi Sosial (Skor 23%), Dimensi Budaya (Skor 22%) dan Dimensi Religius / Keberagaman (Skor 25%), dengan 8 (delapan) variabel dan 40 (empat puluh) indikator, yang pelaksanaan pengukurannya melalui e-Survey Riset Publik.

Sasaran ke-1 dari Renstra Badan adalah *"Meningkatnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Bekasi"* dengan Indikator *"Inklusi Sosial"*. Indikator *"Inklusi Sosial"* digunakan untuk mengukur cipta kondisi keadilan sosial, mengurangi diskriminasi dan membangun masyarakat yang harmonis dalam lingkungan Kota Bekasi. Indikator "*Inklusi Sosial"* diukur melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu:

1. Akses dan kesetaraan layanan publik. dimensi ini diukur dari nilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan setara. Data untuk mengukur dimensi ini diperoleh dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SiSukma Pemerintah Kota Bekasi. (https: //sisukma. bekasikota.go.id/);
2. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi dan Kehidupan Berorganisasi, dimensi ini diukur dari jumlah / proporsi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Politik dan Pemilu yang tercatat / terlaporkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
3. Toleransi dan kehidupan Harmonis Antarwarga, dimensi ini didapatkan dari hasil *Indeks Kota Toleran* (IKT) Indonesia yang dirilis oleh SETARA Institute

Setiap dimensi diukur melalui kombinasi data kuantitatif (Partisipasi Akses) dan Data Kualitatif (Hasil Survei Presepsi). Setiap dimimensi dinormalisasi dalam Skala 1 – 10, lalu dirata – ratakan untuk mendapatkan Nilai Indeks Inklusi Sosial Tahunan. Adapun rumusan pengukuran / formulasi Indikator Inklusi Sosial (IIS) sebagai berikut :

$$= \frac{Skor\ Akses + Skor\ Partisipasi + Skor\ \ Toleransi}{3}$$

Sasaran ke-2 dari Renstra Badan adalah adalah *"Meningkatnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kehidupan*

harmoni di daerah" dengan indikator *"Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan".* Rumus pengukuran dari indikator ini adalah:

$$= \frac{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ Daerah\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Konflik\ Sosial\ Daerah\ yang\ dilaporkan}\ x\ 100\ \%$$

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Badan dalam penanganan konflik yang terjadi di wilayah Kota Bekasi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan penguatan Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan; penguatan fungsi deteksi dini agar tidak menimbulkan konflik sosial daerah. Badan Kesbangpol juga melakukan pendidikan politik ke seluruh lapisan masyarakat di Kota Bekasi serta memberikan pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Kota Bekasi. Untuk menjaga ketentraman dan kerukunan dalam menekan angka kerawanan sosial di Kota Bekasi, Badan Kesbangpol bekerja sama dengan instansi terkait melakukan giat deteksi dini, kewaspadaan dini masyarakat dan pemantauan kondisfitas wilayah untuk menciptakan lingkungan yang aman secara rutin.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi menyediakan program-program kerja, yaitu:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
   Program ini berfungsi sebagai penopang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dengan menitikberatkan pada penyediaan dukungan manajemen, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem kerja kelembagaan.
   Program ini memiliki peran penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penguatan persatuan, demokrasi, politik, dan ketahanan masyarakat di Kota Bekasi. Hasil (*outcome*) dari program ini adalah *"Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"* dengan indikator kinerja *"Persentase Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"*
2) **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
   Program ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan bangsa. Program ini mendorong agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari. Tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang berkarakter, toleran, serta mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah

berbagai tantangan zaman. Hasil (*outcome*) dari program ini adalah "*Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan"* dengan indikator kinerja "*Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*".

3) **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.** Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Partai Politik dan meningkatkan pendidikan politik di tengah masyarakat. Pengembangan etika serta budaya politik juga menjadi tujuan dari Program ini. Hasil (*outcome*) dari program ini adalah "*meningkatnya etika dan budaya politik"*. Program ini diukur melalui indikator "*persentase pendidikan politik pada kader partai politik*".
4) **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.** Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil (*outcome*) dari program ini adalah "*meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan".* Program ini diukur melalui indikator "*persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif*".
5) **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.** Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil (*outcome*) dari program ini adalah "*meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat"*. Program ini diukur melalui indikator "*Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan*".
6) **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional serta peningkatan kualitas penanganan konflik di daerah. Hasil (*outcome*) dari program ini adalah "*meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan"*. Program ini diukur dengan menggunakan indikator "*Persentase konflik sosial yang diselesaikan*".

Selanjutnya, dari keenam program tersebut diturunkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2027, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin Badan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan serta ketentuan yang berlaku. Hasil yang didapat adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.
- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hasil yang didapat adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.297.485.000 Dengan target indikator sebanyak 1316 Orang/bulan, adapun keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 16 laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya sistem pelaporan keuangan SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- **Pendidikan dan Pelatihan Formal**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 10 Orang selama 12 bulan.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 357.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 3 Paket. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 76.500.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 12 Paket. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan dengan target indikator sebanyak 12 Dokumen. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 102.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi

Kunjungan Tamu dengan target indikator sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah meningkatnya fasilitasi terhadap kunjungan Tamu di Perangkat Daerah selama 12 bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.000.000 dengan keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 12 Dokumen. Hasil yang didapat adalah terfasilitasinya penatausahaan Arsip pada OPD selama 12 Bulan. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 202.000.000 dengan Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sejumlah 21 Unit. Hasil yang didapat adalah optimalisasi kinerja PD. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 357.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 15 unit. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana kendaran operasional dinas. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 76.500.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 25 Unit untuk 12 Bulan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Peralatam dan Mesin OPD. Kegiatan ini untuk mendukung operasional Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
  - ✓ Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 455.000.000. Keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 Unit untuk 12 Bulan. Hasil yang didapat adalah terpenuhinya kebutuhan Gedung skretariat bersama organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat pembinaan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

2. Belanja Pelaksana Urusan Badan

a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan ini di implementasikan melalui **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**, dengan indikator Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Target dari Sub Kegitan ini sebanyak 350 Orang.

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.538.000, Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pembinaan Bela Negara di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi. Model pembinaan dengan melaksanakan pendidikan kesemaptaan di Rindam Siliwangi.
- Pembinaan Pembentukan Karakter Kebangsaan. Sasaran dari kegiatan ini pelajar SMA/SMK sederajat se-Kota Bekasi dengan metode sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan/LSM.

Selanjutnya, **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.** Dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebanyak 300 orang. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.900.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Ini penting untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka dengan indikator Sub Kegiatan Jumlah Paskibraka dan target dari Sub Kegitan ini yaitu 52 Orang. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.213.500.892 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Melakukan tahapan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRAKA) Kota Bekasi.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022, Paskibraka tidak hanya disiapkan untuk menaikkan dan menurunkan Bendera Pusaka pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila;
- Adapun hasil yang diharapkan dari berbagai kegiatan yang dianggarkan adalah wawasan kebangsaan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun bangsa yang kuat, demokratis, dan berdaya saing.

b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan ini di implementasikan melalui **Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.**

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun. Output dari Sub Kegitan ini yaitu 11 Dokumen.

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.687.880.000 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan fasilitasi partai politik yang mendapat bantuan keuangan yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi;
- Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan bagi partai politik di Kota Bekasi disesuaikan perolehan suara sah dari partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Lembaga Pemerintah (KPU dan BAWASLU).

Sub Kegiatan selanjutnya adalah **Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.** Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Output dari Sub Kegitan ini yaitu 1500 Orang.

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 228.218.400 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Pembinaan Manajemen Partai Politik. Adapun Hasil yang didapat adalah tertib administrasi dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan dan hibah bagi Parpol dan Ormas di Kota Bekasi. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus Partai Politik di Kota Bekasi;
- Pembinaan pendidikan politik di Kota Bekasi. Kegiatan ini direncanakan tersebar se-Kota Bekasi dengan pelaksanaan pendidikan politik secara *on the spot* di sekolah-sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA/SMK sederajat;
- Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kota Bekasi, termasuk pemahaman tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga, serta pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting untuk membangun masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah.

c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini di implementasikan dalam bentuk **Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.** Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Program Kerja di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Disusun. Output dari Sub Kegitan ini adalah 5 Dokumen.

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.778.103.058 Keluaran dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini berupa Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat Bantuan Dana Hibah. Adapun hasil yang didapat adalah terfasilitasinya hibah sebanyak 5 Ormas/LSM di Kota Bekasi.

Sub Kegiatan selanjutnya adalah **Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.** Adapun Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target 100 orang. Sub kegiatan ini diberikan pagu sebesar Rp. 105.180.000.

d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui **Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.** Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Output dari Sub Kegitan ini yaitu 2.800 Orang.

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 610.689.503 dengan keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah:

- Pelaksanaan fasilitasi pencegahan narkoba sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan pertama dengan melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) bekerja sama dengan unsur stakeholder terkait, dan pelaksanaan kedua dengan memberikan Pembinaan Sosialisasi Bahaya Narkoba (P4GN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun hasil yang didapat

adalah memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba;

- Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama dengan tema sinergitas pemerintah daerah dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat di setiap kecamatan dengan berpedoman kepada peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 perihal dengan pembinaan penyelenggaraan kerukunan beragama di daerah. Adapun hasil yang didapat adalah membangun sinergitas antara pemerintah daerah bersama dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyrakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bekasi.

e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**, dengan indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output dari Sub Kegitan ini sebanyak 70 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 114.737.400. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Sosialisasi pengawasan Orang Asing. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah tertibnya administrasi orang asing di Kota Bekasi;
- Pelatihan dasar Intelejen Kasie Trantib Kecamatan dan Kelurahan. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah

terlaksananya pemantauan Kantrantibmas secara rutin di Kota Bekasi;

- Pembinaan anggota FKDM tingkat Kecamatan. Kegiatan ini memiliki kelompok sasaran yang berasal dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kota dan Kecamatan. FKDM merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah Permendagri Nomor 46 Tahun 2019. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan FKDM sebagai lembaga yang di bentuk pemerintah yang mempunyai tugas utama yaitu menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban melalui menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam bentuk tindakan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

Selanjutnya adalah **Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.** Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Output Sub Kegitan sebanyak 12 Laporan.

Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 564.480.000. Keluaran dan hasil yang diperoleh dari sub kegiatan ini adalah :

- Jumlah Laporan Hasil Kewaspadaan Dini Daerah. Adapun hasil yang didapat yaitu fasilitasi penyelenggaraan Tim kewaspadaan dini daerah selama 12 Bulan di Kota Bekasi. Fokus kegiatan ini adalah melakukan deteksi dini dalam upaya membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko konflik, mengurangi dampak konflik, dan memfasilitasi pemulihan pasca-konflik.

Sub kegiatan selanjutnya adalah **Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.** Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan Output sebanyak 12 Dokumen. Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.440.000.000.

Semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kesesuaian ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tidak hanya mendukung visi dan misi pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil oleh Badan Kesbangpol harus terintegrasi dengan rencana strategis yang lebih besar, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dianggarkan secara terperinci. Proses penganggaran yang cermat ini bertujuan untuk menjamin bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan dengan efisien dan efektif. Anggaran yang disusun mencerminkan prioritas dan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Keterkaitan antara dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting dalam mencapai sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap elemen dalam struktur ini saling mendukung dan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol, yang mencakup peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan pemeliharaan persatuan serta kesatuan masyarakat di Kota Bekasi. Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik berarti Badan Kesbangpol berkomitmen untuk memberikan layanan yang transparan, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan sistem pelaporan yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penyediaan layanan yang memenuhi harapan masyarakat. Sementara itu, merawat persatuan dan kesatuan masyarakat

merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan. Ini dapat dicapai melalui program-program yang mendorong dialog antar kelompok, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, melalui pelaksanaan yang terintegrasi, Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat, sehingga menciptakan Kota Bekasi yang lebih baik dan berdaya saing.

Tabel 4 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.01	**Unsur Pemerintahan Umum**									
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**Badan Kesbangpol**	**100%**	**12.392.385.000**	**PAD/ DAU/SILPA**	**100%**	**13.747.579.258**	-
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK**	**Dokumen**	**Badan Kesbangpol**	**2 Dokumen**	**76.500.000**	**PAD**	**2 Dokumen**	**78.030.000**	-
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Badan Kesbangpol	1 Dokumen	51.000.000	PAD	1 Dokumen	52.020.000	-
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Badan Kesbangpol	1 Laporan	25.500.000	PAD	1 Laporan	26.010.000	-
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK**	**Laporan**	**Badan Kesbangpol**	**2 Laporan**	**10.312.485.000**	**PAD/ DAU**	**2 Laporan**	**11.732.081.258**	**-**
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	Badan Kesbangpol	1.316 Orang / Bulan	10.297.485.000	PAD/DAU	1.316 Orang / Bulan	11.717.081.258	-
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan	Badan Kesbangpol	16 Laporan	15.000.000	PAD	16 Laporan	15.000.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK**	**Laporan**	**Badan Kesbangpol**	**1 Laporan**	**20.400.000**	**SILPA**	**3 Laporan**	**220.808.000**	**-**
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Badan Kesbangpol	5 Orang	20.400.000	SILPA	5 Orang	20.808.000	-
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK**	**Laporan**	**Badan Kesbangpol**	**6 Laporan**	**892.500.000**	**PAD/ SILPA**	**6 Laporan**	**910.350.000**	**-**
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Badan Kesbangpol	4 Paket	357.000.000	SILPA	4 Paket	364.140.000	-
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Badan Kesbangpol	12 Paket	76.500.000	SILPA	12 Paket	78.030.000	-
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	51.000.000	SILPA	12 Dokumen	52.020.000	-
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Badan Kesbangpol	12 Laporan	102.000.000	SILPA	12 Laporan	104.040.000	-
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Badan Kesbangpol	12 Laporan	255.000.000	SILPA	12 Laporan	260.100.000	-
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Badan Kesbangpol	12 Dokumen	51.000.000	PAD	12 Dokumen	52.020.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Laporan**	**Badan Kesbangpol**	**1 Laporan**	**202.000.000**	**DAU**	**1 Laporan**	**104.040.000**	**-**
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Badan Kesbangpol	21 Unit	202.000.000	DAU	7 Unit	104.040.000	-
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Laporan**	**Badan Kesbangpol**	**3 Laporan**	**888.500.000**	**DAU/SILPA**	**3 Laporan**	**702.270.000**	**-**
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Badan Kesbangpol	15 Unit	357.000.000	SILPA	15 Unit	364.140.000	-
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Badan Kesbangpol	25 Unit	76.500.000	SILPA	25 Unit	78.030.000	-
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Badan Kesbangpol	1 Unit	455.000.000	DAU	1 Unit	260.100.000	-
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**%**	**Kota Bekasi**	**100%**	**1.285.938.892**	**PAD/ SILPA**	**100%**	**2.097.398.650**	**-**
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah sub kegiatan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Sub Kegiatan**	**Kota Bekasi**	**3 Sub Kegiatan**	**1.285.938.892**	**PAD/ SILPA**	**4 Sub Kegiatan**	**2.097.398.650**	**-**
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Orang	Kota Bekasi	350 Orang	21.538.000	PAD	280 Orang	55.619.184	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Kota Bekasi	300 Orang	50.900.000	PAD	120 Orang	556.191.840	-
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Kota Bekasi	-	-	PAD	1 Dokumen	202.189.082	-
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	Kota Bekasi	52 Orang	1.213.500.892	SILPA	60 Orang	1.283.398.544	-
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik**	**%**	**Kota Bekasi**	**100%**	**9.916.098.400,**	**PAD**	**100%**	**11.444.069.814**	**-**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Sub Kegiatan**	**Kota Bekasi**	**2 Sub Kegiatan**	**9.916.098.400**	**PAD**	**2 Sub Kegiatan**	**11.444.069.814**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Kota Bekasi	11 Dokumen	9.687.880.000	PAD	11 Dokumen	11.054.735.526	-
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Kota Bekasi	1.250 Orang	228.218.400	PAD	500 Orang	389.334.288	-
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif**	**%**	**Kota Bekasi**	**71%**	**2.883.283.058**	**SILPA/ PAD**	**72%**	**6.507.444.528**	**-**
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Sub Kegiatan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**	**Sub Kegiatan**	**Kota Bekasi**	**2 Sub Kegiatan**	**2.883.283.058**	**SILPA**	**2 Sub Kegiatan**	**6.507.444.528**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Kota Bekasi	5 Dokumen	2.778.103.058	SILPA	6 Dokumen	6.396.206.160	-
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Kota Bekasi	300 Orang	105.180.000	PAD	150 Orang	111.238.368	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan**	**%**	**Kota Bekasi**	**100%**	**610.689.503**	**Dana Khusus**	**100%**	**420.281.803**	**-**
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Sub Kegiatan**	**Kota Bekasi**	**1 Sub Kegiatan**	**610.689.503**	**Dana Khusus**	**1 Sub Kegiatan**	**420.281.803**	**-**
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Orang	Kota Bekasi	2.800 Orang	610.689.503	Dana Khusus	400 Orang	420.281.803	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik sosial yang diselesaikan**	**%**	**Kota Bekasi**	**100%**	**2.119.217.400**	**PAD/ SILPA**	**100%**	**2.933.578.241**	**-**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Sub Kegiatan**	**Kota Bekasi**	**3 Sub Kegiatan**	**2.119.217.400**	**PAD/ SILPA**	**3 Sub Kegiatan**	**2.933.578.241**	**-**
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Kota Bekasi	70 Orang	114.737.400	PAD	70	400.000.000	-
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Laporan	Kota Bekasi	12 Laporan	564.480.000	PAD	12 Laporan	610.080.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Satuan	Lokasi	Rencana Tahun 2027 (N)			Prakiraan Maju Tahun 2028 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Kota Bekasi	12 Dokumen	1.440.000.000	SILPA	12 Dokumen	1.923.498.241	-
Total						**29.207.612.253**			**37.150.352.294**	

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2027

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 Yang Didasarkan Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol adalah urusan Pemerintahan Umum, yang merupakan urusan wajib. Kebersinambungan Rencana Kerja Kesbangpol dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat yaitu dengan adanya Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan pada program-program Badan Kesbangpol.

Urusan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi kemudian dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan yang merupakan penerjemahan dari RPJMD Kota Bekasi 2025 – 2029. Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5 1 Target dan Capaian Kinerja IKU Badan Kesbangpol Kota Bekasi

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian					Catatan Analisis
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Inklusi Sosial Rumus: $\frac{Skor\ Akses + Skor\ Partisipasi + Skor\ Toleransi}{3}$	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,73	8,13	-	-	-	-	
2	Persentase konflik sosial daerah yang diselesaikan Rumus: $\frac{Jml.konflik\ SARA\ yang\ diselesaikan\ (n)}{Jml.konflik\ SARA\ yang\ dilaporkan\ (n)} x100$	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	-	-	-	-	

Sumber: Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029

Data di atas menunjukan bahwa Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada TA. 2025 berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi selama TA. 2025. Untuk melanjutkan pencapaian tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melanjutkan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam Bab IV Renja ini.

Program dan Kegiatan dalam periode tahunan yang akan dilaksanakan merupakan upaya untuk mewujudkan Misi Kota Bekasi. Program dan Kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun 2027 dibagi berdasarkan 2 (dua) bagian besar, yaitu Program Prioritas dan Program Rutin (Program yang ada dihampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah).

Program Prioritas Badan Kesbangpol adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Jumlah Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol tahun 2027 berjumlah 6 (Enam) program yang dijabarkan dalam 11 (Sebelas) kegiatan dan 27 (Dua puluh tujuh) Sub Kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan berlokasi di Kota Bekasi dan Luar Kota Bekasi dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Bekasi.

Rumusan program dan kegiatan Badan Kesbangpol seluruhnya telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk pagu indikatif masih terdapat beberapa perbedaan (dan perubahan) karena pagu anggaran yang terdapat pada Rancangan RKPD masih bersifat tentatif, banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran di tingkat TAPD, dan masih akan disesuaikan dengan kebutuhan akan ketercapaian indikator dan target kinerja kegiatan-kegiatan.

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 Yang Didasarkan Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh karena itu, IKK sama dengan IKU Badan Kesbangpol Kota Bekasi

BAB VI PENUTUP

6.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Penetapan program dan kegiatan yang ada di dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melakukan perumusan Renja, kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi dijadikan rujukan utama di dalam proses penyusunan. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Renja ini adalah prinsip efesiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Inti dari penyusunan Renja ini adalah optimalisasi pencapaian hasil dari upaya Perangkat Daerah per tahun anggaran. Selain itu, Renja mempunyai posisi penting di dalam menciptakan keterpaduan dan sinkronasi antar kegiatan yang ada di dalam satu program, maupun kegiatan-kegiatan yang berlainan program. Oleh karenanya, untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronasi di dalam pelaksanaan program/kegaiatan yang telah direncanakan, diperlukan *sharing* informasi dari Program/Kegaiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Renja lah *sharing* informasi itu dapat dilaksanakan.

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan terdapat kendala, baik dalam proses pelaksanaan fisik dan anggaran, maka akan dilakukan penyesuain dokumen perencanaan kerja. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Perubahan yang terlebih dahulu dilakukan proses keselarasan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2027. Untuk menyusun Renja Badan Kesbangpol Kota Bekasi ini setiap tahapan perencanaan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Dimulai dari penjaringan usulan yang berasal dari Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Forum Musrenbang Tingkat Kota Bekasi. Pada setiap tahapan perencanaan yang dijalani, memungkinkan terjadinya kesalahan maupun distorsi maksud atau tujuan dari usulan. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2027,

Badan Kesbangpol Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Renja ini. Oleh karena itu, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi pada perubahan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan pemahaman dan penguatan fungsi deteksi dini dari setiap aparatur Badan Kesbangpol. Hal ini diperlukan untuk melakukan analisa kerawanan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu tahapan preventif maupun rehabilitasi;
2. Perlu meningkatkan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa solidaritas dan tenggang rasa di masyarakat Kota Bekasi;
3. Aparatur Badan Kesbangpol yang ada saat ini dari sisi kualitas masih kurang, sehingga akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penambahan jumlah pegawai;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam proses pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bekasi, 03 Agustus 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bekasi

Drs. Hudi Wijayanto, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19690121 199007 1 001

USULAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2027

NO	JENIS BELANJA	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027 (RENSTRA TAHUN 2025-2029)	PAGU INDIKATIF RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027	PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027
1	BELANJA LANGSUNG PENUJANG URUSAN/ RUTIN (BELANJA OPERASIONAL DAN MODAL)	Rp. 13.478.018.880,-	Rp. 13.478.018.880,-	Rp. 12,392.385.000,-
2	BELANJA LANGSUNG URUSAN (BELANJA OPERASIONAL DAN MODAL)	RP. 22.128.189.331,-	RP. 22.128.189.331,-	RP. 16.815.227.253,-
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 37.150.352.294,-	Rp. 37.150.352.294,-	RP. 29.207.612.253,-

Catatan :

Berdasarkan hasil pemetaan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029, Badan Kesbangpol untuk tahun Anggaran 2027 termuat pagu anggaran berjumlah Rp. **37.150.352.294,-** akan tetapi setelah adanya beberapa kegiatan hasil penyesuaian kebijakan, hasil desk internal rancangan awal pada pagu anggaran berubah menjadi Rp. **37.150.352.294,-**. dan pada hasil desk dengan Bappelitbangda Pagu Anggaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol menjadi Rp. **29.207.612.253,-**.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi adanya faktor kenaikan pagu anggaran yang diusulkan oleh Badan Kesbangpol, diantaranya :

- Penyesuaian Pagu Anggaran untuk Hibah Organisasi Kemasyarakatan
- Penyesuaian Bantuan Keuangan Partai Politik (Berdasarkan data perolehan suara sah pemilu yang menentukan jumlah partai politik yang akan mengisi di pos-pos parlemen dengan besaran perhitungan perolehan surat suara sah untuk Bantuan Parpol di TA. 2027)
- Penyesuaian besaran pagu anggaran untuk memfasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Penyesuaian pagu anggaran untuk memenuhi kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran Perangkat Daerah